



Optimalisasi Administrasi Kurikulum dan Implikasinya terhadap Kinerja Pedagogik Guru di Madrasah Tsanawiyah Lokus MTs Al Hasan Cikampek

Ayi Najmul Hidayat, Sobari, Nurhayati

Departemen Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara
ayinajmul@gmail.com*, sobari@uninus.ac.id, hnoer7518@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi administrasi kurikulum serta implikasinya terhadap kinerja pedagogik guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Administrasi kurikulum sering dipersepsi sebagai pemenuhan tuntutan administratif semata, padahal secara substantif perangkat perencanaan pembelajaran merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, sistematis, dan berpusat pada peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap perangkat administrasi kurikulum guru, observasi pembelajaran di kelas, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan guru dan pengelola kurikulum. Penelitian dilaksanakan di MTs Al Hasan Cikampek Kabupaten Karawang dengan melibatkan guru mata pelajaran dan unsur manajemen kurikulum madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas administrasi kurikulum yang meliputi Program Tahunan, Program Semester, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, serta instrumen asesmen memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja pedagogik guru. Guru yang menyusun administrasi kurikulum secara sistematis dan terpadu cenderung mampu mengelola pembelajaran dengan lebih terarah, menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Sebaliknya, administrasi kurikulum yang disusun secara minimal berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan data asesmen dan lemahnya refleksi pembelajaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi administrasi kurikulum dan kolaborasi guru melalui MGMP internal madrasah berkontribusi dalam mengurangi beban administratif sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pedagogik. Kesimpulannya, administrasi kurikulum perlu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen manajerial, tetapi sebagai sarana strategis dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja pedagogik guru, khususnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah.

Kata kunci: Administrasi Kurikulum, Kinerja Pedagogik, Guru MTs, Kurikulum Merdeka, Profesionalisme Guru.

1. Latar Belakang

Perubahan kebijakan kurikulum nasional dan percepatan transformasi digital dalam dunia pendidikan menuntut satuan pendidikan untuk melakukan penyesuaian tata kelola pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian Agama memiliki tantangan ganda, yakni menjaga kekhasan pendidikan keislaman sekaligus mengimplementasikan kebijakan kurikulum nasional yang dinamis. Dalam konteks tersebut, guru tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelaksana teknis kurikulum, tetapi sebagai perancang pembelajaran yang memiliki tanggung jawab profesional dalam menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam praktik pedagogik yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Kompetensi pedagogik guru menjadi indikator utama profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan. Kompetensi ini mencakup kemampuan memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, serta melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran secara berkelanjutan [1]. Dalam praktiknya, kompetensi pedagogik tidak dapat dilepaskan dari kualitas perencanaan pembelajaran yang secara formal tertuang dalam administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum menjadi representasi konkret dari proses berpikir pedagogik guru sebelum pembelajaran dilaksanakan di kelas.

Administrasi kurikulum meliputi berbagai perangkat perencanaan pembelajaran seperti Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, serta instrumen asesmen. Perangkat tersebut berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan guru dalam mengelola pembelajaran agar

selaras dengan tujuan kurikulum dan karakteristik peserta didik [2]. Secara ideal, administrasi kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat refleksi pedagogik yang membantu guru merancang strategi pembelajaran yang sistematis dan bermakna.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa administrasi kurikulum di satuan pendidikan, termasuk madrasah, masih sering dipersepsi sebagai beban administratif yang bersifat formalistik [3]. Guru kerap memandang penyusunan perangkat pembelajaran sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk kepentingan supervisi atau akreditasi, bukan sebagai kebutuhan pedagogik yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran [4]. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perencanaan tertulis dalam administrasi kurikulum dengan praktik pembelajaran yang dilaksanakan di kelas.

Fenomena tersebut diperkuat oleh temuan Rachmaningtyas (2025) yang menegaskan bahwa rendahnya pemaknaan guru terhadap fungsi perencanaan pembelajaran berkontribusi pada lemahnya keterpaduan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen [5]. Rachmaningtyas (2025) menyatakan bahwa administrasi pembelajaran yang disusun tanpa refleksi pedagogik cenderung bersifat repetitif dan tidak adaptif terhadap kebutuhan peserta didik [5]. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi kurikulum bukan terletak pada kuantitas dokumen, melainkan pada kualitas dan pemanfaatannya dalam praktik pedagogik.

Implementasi Kurikulum Merdeka semakin memperkuat urgensi optimalisasi administrasi kurikulum di madrasah. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk memiliki fleksibilitas dalam merancang pembelajaran berbasis asesmen diagnostik, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Dalam konteks ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, bukan sekadar menyalin format administrasi yang bersifat umum [6].

Menurut Widiansyah et al. (2025), implementasi Kurikulum Merdeka akan berjalan efektif apabila guru memiliki kesiapan administratif dan pedagogik yang memadai. Widiansyah et al. (2025) menekankan bahwa administrasi kurikulum yang adaptif menjadi prasyarat utama bagi guru dalam menerjemahkan fleksibilitas kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang terstruktur [7]. Tanpa dukungan administrasi kurikulum yang tertata, fleksibilitas yang ditawarkan Kurikulum Merdeka justru berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Selain itu, perkembangan teknologi digital turut memengaruhi cara guru mengelola administrasi kurikulum. Digitalisasi administrasi pembelajaran membuka peluang bagi guru untuk menyusun, menyimpan, dan merevisi perangkat ajar secara lebih efisien dan kolaboratif. Faizah et al. (2025) menyatakan bahwa pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan administrasi pembelajaran mampu mengurangi beban kerja administratif guru sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran [8]. Digitalisasi administrasi tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga mendorong guru untuk lebih reflektif dalam merancang pembelajaran.

Hasil observasi awal di MTs Al Hasan Cikampek, Kabupaten Karawang, menunjukkan adanya variasi kualitas administrasi kurikulum yang disusun oleh guru. Sebagian guru telah menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap, namun belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen. Di sisi lain, terdapat pula guru yang menyusun administrasi kurikulum secara minimal, sehingga pembelajaran cenderung berlangsung tanpa perencanaan yang terstruktur. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan data asesmen dalam perbaikan pembelajaran serta terbatasnya diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rohmaniah et al. (2025) yang menyatakan bahwa kualitas administrasi kurikulum berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran di kelas. Rohmaniah et al. (2025) menegaskan bahwa guru yang memiliki administrasi pembelajaran yang tertata dengan baik cenderung menunjukkan kinerja pedagogik yang lebih optimal, khususnya dalam pengelolaan kelas dan pemilihan strategi pembelajaran [9]. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi kurikulum memiliki implikasi langsung terhadap kualitas proses pembelajaran.

Aspek kolaborasi guru juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi administrasi kurikulum. Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara ideal berfungsi sebagai wadah profesional untuk berbagi praktik baik, merefleksikan perangkat pembelajaran, dan meningkatkan kualitas administrasi kurikulum secara kolektif. Namun, dalam praktiknya, MGMP di tingkat satuan pendidikan sering kali belum dimanfaatkan secara optimal sebagai forum refleksi berkelanjutan. Thoharudin et al. (2025) menyatakan bahwa lemahnya budaya

kolaborasi guru berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan pembelajaran dan meningkatnya beban kerja individual guru. Thoharudin et al. (2025) menekankan pentingnya penguatan MGMP sebagai strategi peningkatan profesionalisme guru berbasis kolaborasi [10].

Selain kolaborasi, supervisi akademik juga memiliki peran strategis dalam mendorong optimalisasi administrasi kurikulum. Supervisi yang berfokus pada substansi perencanaan pembelajaran, bukan sekadar kelengkapan dokumen, dapat membantu guru memaknai administrasi kurikulum sebagai alat pengembangan profesional. Rusdiana et al. (2026) menegaskan bahwa supervisi akademik yang bersifat pembinaan dan reflektif mampu meningkatkan kualitas administrasi pembelajaran sekaligus kinerja pedagogik guru. Rusdiana et al. (2026) menekankan bahwa supervisi yang efektif harus mampu menghubungkan perencanaan tertulis dengan praktik pembelajaran di kelas [11].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi administrasi kurikulum merupakan isu strategis dalam peningkatan kinerja pedagogik guru di Madrasah Tsanawiyah. Administrasi kurikulum yang disusun secara sistematis, adaptif, dan bermakna tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai fondasi pedagogik dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana administrasi kurikulum dikelola, dimaknai, dan diimplementasikan oleh guru di MTs Al Hasan Cikampek, serta implikasinya terhadap kinerja pedagogik guru dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka.

2. Metode Penelitian

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan administrasi kurikulum serta implikasinya terhadap kinerja pedagogik guru dalam konteks alami madrasah [12]. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menginterpretasikan makna di balik praktik administrasi kurikulum sebagai bagian dari proses profesional guru.

Jenis penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual pengelolaan administrasi kurikulum serta menganalisis keterkaitannya dengan praktik pedagogik guru di kelas. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena pendidikan yang bersifat kontekstual dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat penelitian berlangsung [13].

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Hasan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik madrasah yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara bertahap dan memiliki keragaman latar belakang guru dalam pengelolaan administrasi kurikulum. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2025/2026, yakni antara bulan Oktober hingga Desember 2025, sehingga data yang diperoleh merepresentasikan kondisi aktual pengelolaan administrasi kurikulum di madrasah.

2.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam kajian ini terdiri atas 12 orang guru mata pelajaran yang aktif mengajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Hasan Cikampek, satu orang wakil kepala madrasah bidang kurikulum, serta satu orang koordinator Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) internal madrasah. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada peran strategis masing-masing dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi kurikulum di lingkungan madrasah. Guru mata pelajaran dipilih sebagai subjek utama karena mereka merupakan aktor kunci dalam penyusunan perangkat pembelajaran serta pelaksana langsung pembelajaran di kelas.

Wakil kepala madrasah bidang kurikulum dilibatkan sebagai subjek penelitian karena memiliki tanggung jawab struktural dalam mengoordinasikan kebijakan kurikulum, melakukan supervisi akademik, serta memastikan keterlaksanaan administrasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sementara itu, koordinator MGMP internal

madrasah dilibatkan untuk memperoleh perspektif terkait praktik kolaborasi guru dalam penyusunan dan pengembangan administrasi kurikulum secara kolektif.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan utama dalam pemilihan subjek adalah keterlibatan langsung dalam penyusunan administrasi kurikulum, pengalaman dalam mengimplementasikan perangkat pembelajaran di kelas, serta peran aktif dalam kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran [12]. Dengan demikian, subjek penelitian dipandang mampu memberikan informasi yang mendalam dan kontekstual terkait pengelolaan administrasi kurikulum dan implikasinya terhadap kinerja pedagogik guru.

2.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi peneliti dengan konteks penelitian. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi pembelajaran di kelas, analisis dokumen administrasi kurikulum guru, serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan guru dan pengelola kurikulum madrasah.

Observasi pembelajaran dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik pedagogik guru serta kesesuaian antara perencanaan tertulis dalam administrasi kurikulum dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Analisis dokumen administrasi kurikulum dilakukan terhadap perangkat pembelajaran yang disusun guru, seperti Program Tahunan, Program Semester, Alur Tujuan Pembelajaran, modul ajar, dan instrumen asesmen, guna menilai kelengkapan, keterpaduan, dan relevansinya dengan praktik pembelajaran. Sementara itu, FGD digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, kendala, dan strategi guru serta pengelola kurikulum dalam menyusun dan mengimplementasikan administrasi kurikulum secara kolaboratif.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi regulasi resmi pemerintah, khususnya kebijakan Kementerian Agama terkait implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, buku referensi yang membahas manajemen kurikulum dan kompetensi pedagogik guru, serta artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoretis dan normatif untuk memperkuat analisis serta membandingkan temuan penelitian dengan hasil kajian sebelumnya [6], [14].

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara berikut:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah perangkat administrasi kurikulum guru yang meliputi Program Tahunan, Program Semester, Alur Tujuan Pembelajaran, modul ajar, dan instrumen asesmen. Analisis difokuskan pada kelengkapan, keterpaduan, serta relevansi perangkat dengan praktik pembelajaran di kelas [2].

2. Observasi Pembelajaran

Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pembelajaran untuk mengamati kesesuaian antara perencanaan tertulis dalam administrasi kurikulum dengan praktik pedagogik guru di kelas. Observasi bersifat non-partisipatif dan menggunakan panduan observasi yang disusun berdasarkan indikator kompetensi pedagogik guru [1].

3. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

FGD dilaksanakan dengan melibatkan guru mata pelajaran dan pengelola kurikulum madrasah. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali persepsi, kendala, serta strategi guru dalam menyusun dan mengimplementasikan

administrasi kurikulum secara kolaboratif. FGD dipilih karena mampu menghasilkan data reflektif dan interaktif yang memperkaya temuan penelitian [13].

2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [15]. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data pada aspek administrasi kurikulum yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja pedagogik guru. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan untuk mempermudah pemahaman pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik guna menjamin keabsahan data.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil penelitian

3.1.1 Kondisi Administrasi Kurikulum Guru

Hasil analisis dokumen administrasi kurikulum menunjukkan bahwa guru MTs Al Hasan Cikampek secara umum telah memenuhi kewajiban administratif dasar, khususnya dalam penyusunan Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes). Dokumen tersebut tersedia hampir pada seluruh guru mata pelajaran dan disusun mengikuti format yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran guru terhadap pentingnya pemenuhan administrasi kurikulum sebagai bagian dari tugas profesional.

Namun demikian, dari aspek kualitas dan keterpaduan antarperangkat, masih ditemukan variasi yang cukup signifikan. Keterkaitan antara Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, dan instrumen asesmen belum sepenuhnya tersusun secara konsisten. Beberapa modul ajar disusun secara umum dan bersifat generik, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik peserta didik maupun konteks kelas yang dihadapi guru. Selain itu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam ATP tidak selalu terjabarkan secara operasional dalam aktivitas pembelajaran dan asesmen yang dirancang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi kurikulum masih diposisikan oleh sebagian guru sebagai dokumen formal, bukan sebagai alat pedagogik yang dinamis. Ketidakkonsistensiannya berimplikasi pada lemahnya fungsi administrasi kurikulum sebagai panduan pembelajaran yang sistematis dan reflektif.

3.1.2 Pemanfaatan Administrasi dalam Praktik Pembelajaran

Hasil observasi pembelajaran menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara guru yang memiliki administrasi kurikulum yang tersusun secara sistematis dengan guru yang menyusun administrasi secara minimal. Guru yang memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap dan terpadu cenderung mampu mengelola pembelajaran dengan lebih terarah. Guru dapat menjelaskan tujuan pembelajaran di awal kegiatan, mengatur alur pembelajaran secara runtut, serta memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas dan karakteristik peserta didik.

Sebaliknya, pada pembelajaran yang administrasi kurikulumnya disusun secara terbatas, proses pembelajaran cenderung berlangsung tanpa skenario yang jelas. Aktivitas pembelajaran lebih bersifat spontan dan tidak selalu merujuk pada perencanaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan waktu, ketercapaian tujuan pembelajaran, serta rendahnya konsistensi antara rencana dan pelaksanaan pembelajaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas administrasi kurikulum berpengaruh langsung terhadap kualitas praktik pedagogik guru di kelas. Administrasi kurikulum yang bermakna berfungsi sebagai peta pembelajaran yang membantu guru menjaga fokus dan arah pembelajaran.

3.1.3 Pemanfaatan Data Asesmen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data asesmen dalam perencanaan pembelajaran masih bervariasi antar guru. Sebagian guru telah memanfaatkan hasil asesmen formatif sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pembelajaran, termasuk kegiatan remedial dan pengayaan. Guru-guru tersebut menunjukkan kemampuan dalam mengaitkan hasil asesmen dengan penyesuaian strategi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Namun, terdapat pula guru yang melaksanakan asesmen hanya sebagai pemenuhan administrasi penilaian. Hasil asesmen dicatat, tetapi tidak ditindaklanjuti secara sistematis dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Dokumentasi hasil asesmen yang tidak terintegrasi dengan modul ajar menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam melakukan refleksi pembelajaran secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa asesmen belum sepenuhnya dimaknai sebagai instrumen pedagogik yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan pemanfaatan data asesmen dipengaruhi oleh belum adanya sistem dokumentasi asesmen yang terstruktur dan mudah diakses oleh guru. Sebagian guru masih mencatat hasil asesmen secara terpisah dari perangkat pembelajaran utama, sehingga data tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan pembelajaran berikutnya. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya penggunaan asesmen sebagai dasar pengambilan keputusan pedagogik, khususnya dalam merancang pembelajaran diferensiatif sesuai dengan tingkat capaian belajar peserta didik. Dengan demikian, asesmen belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat refleksi berkelanjutan yang membantu guru memantau perkembangan belajar siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran secara sistematis.

3.1.4 Praktik Kolaborasi Guru dalam Administrasi Kurikulum

Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) menunjukkan bahwa praktik kolaborasi guru dalam penyusunan administrasi kurikulum masih bersifat terbatas dan insidental. Kolaborasi umumnya dilakukan pada awal tahun pelajaran, terutama dalam penyusunan Prota dan Promes. MGMP internal madrasah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai forum refleksi berkelanjutan terhadap kualitas perangkat ajar dan praktik pembelajaran di kelas.

Meskipun demikian, guru menyatakan bahwa kegiatan kolaboratif yang telah dilakukan memberikan dampak positif, khususnya dalam mengurangi beban kerja individual dan meningkatkan pemahaman terhadap struktur administrasi kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi memiliki potensi besar untuk dioptimalkan sebagai strategi peningkatan kualitas administrasi kurikulum dan kinerja pedagogik guru.

3.2 Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas administrasi kurikulum memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja pedagogik guru di MTs Al Hasan Cikampek. Administrasi kurikulum yang disusun secara sistematis, terpadu, dan kontekstual berfungsi sebagai kerangka pedagogik yang memandu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Hal ini menguatkan pandangan bahwa administrasi kurikulum bukan sekadar instrumen administratif, melainkan representasi dari proses berpikir pedagogik guru [1]. Dengan kata lain, kualitas administrasi kurikulum mencerminkan sejauh mana guru memahami perannya sebagai perancang pembelajaran, bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan mengajar di kelas.

Variasi kualitas perangkat administrasi kurikulum yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan adanya perbedaan pemaknaan guru terhadap fungsi perencanaan pembelajaran. Guru yang memandang administrasi kurikulum sebagai alat pedagogik cenderung menyusun modul ajar yang lebih terstruktur, sistematis, serta selaras dengan tujuan pembelajaran dan asesmen. Sebaliknya, guru yang memaknai administrasi kurikulum sebagai kewajiban administratif semata cenderung menyusun perangkat pembelajaran secara minimal dan kurang reflektif. Kondisi ini berdampak pada lemahnya keterpaduan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman guru terhadap struktur dan logika kurikulum berpengaruh langsung terhadap kualitas implementasi pembelajaran di kelas [14].

Hasil observasi pembelajaran dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa keterpaduan antara perencanaan tertulis dan praktik mengajar menjadi indikator penting kinerja pedagogik guru. Guru yang memiliki administrasi

kurikulum yang tertata mampu mengelola pembelajaran secara lebih terarah, mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran yang jelas, pengelolaan aktivitas kelas yang sistematis, hingga penutupan pembelajaran yang bersifat reflektif. Perencanaan pembelajaran yang baik memberikan panduan bagi guru dalam mengelola waktu, memilih metode yang sesuai, serta mengantisipasi berbagai dinamika yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa perencanaan pembelajaran yang matang merupakan prasyarat utama terwujudnya pembelajaran yang efektif dan bermakna [4].

Sebaliknya, pada pembelajaran yang administrasi kurikulumnya disusun secara minimal, proses pembelajaran cenderung berlangsung tanpa arah yang jelas. Aktivitas pembelajaran lebih bersifat reaktif dan spontan, sehingga tujuan pembelajaran tidak selalu tercapai secara optimal. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran ini menunjukkan bahwa lemahnya administrasi kurikulum berdampak langsung pada rendahnya kualitas kinerja pedagogik guru. Dengan demikian, administrasi kurikulum memiliki fungsi strategis sebagai alat kendali pedagogik yang membantu guru menjaga konsistensi dan kualitas pembelajaran.

Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, temuan penelitian ini menjadi semakin relevan. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk memiliki fleksibilitas dalam merancang pembelajaran yang berbasis asesmen diagnostik dan diferensiasi. Fleksibilitas ini menempatkan guru sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan pedagogik di kelas. Namun, fleksibilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila guru memiliki kesiapan administratif dan pedagogik yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama guru bukan terletak pada kompleksitas kebijakan Kurikulum Merdeka, melainkan pada kemampuan guru dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam perencanaan pembelajaran yang sistematis dan berbasis data [6].

Ketika administrasi kurikulum disusun secara minimal dan tidak reflektif, fleksibilitas yang ditawarkan Kurikulum Merdeka justru berpotensi menimbulkan kebingungan dalam praktik pembelajaran. Guru mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang terdiferensiasi, memanfaatkan data asesmen diagnostik, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kurikulum harus diimbangi dengan penguatan kapasitas guru dalam menyusun administrasi kurikulum yang adaptif dan bermakna.

Pemanfaatan data asesmen yang belum optimal, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, juga menunjukkan bahwa asesmen masih sering diposisikan sebagai aktivitas administratif, bukan sebagai instrumen pedagogik. Sebagian guru telah memanfaatkan hasil asesmen formatif untuk melakukan perbaikan pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Namun, terdapat pula guru yang melaksanakan asesmen hanya sebagai pemenuhan kewajiban penilaian, tanpa tindak lanjut yang terdokumentasi secara sistematis. Padahal, asesmen yang terintegrasi dengan perencanaan pembelajaran memungkinkan guru melakukan refleksi pedagogik secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dari waktu ke waktu [3].

Ketiadaan integrasi antara hasil asesmen dan modul ajar menyebabkan guru kesulitan dalam menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan capaian belajar peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi kurikulum dan asesmen seharusnya dipahami sebagai satu kesatuan proses pedagogik yang saling terkait. Administrasi kurikulum yang baik tidak hanya memuat rencana pembelajaran, tetapi juga memfasilitasi guru dalam memanfaatkan data asesmen sebagai dasar pengambilan keputusan pedagogik.

Aspek kolaborasi guru melalui MGMP internal madrasah juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Kolaborasi guru dalam penyusunan administrasi kurikulum masih bersifat insidental dan terbatas pada momen tertentu, seperti awal tahun pelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kurikulum belum sepenuhnya dipahami sebagai tanggung jawab kolektif. Padahal, kolaborasi profesional antarguru memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas perangkat ajar dan praktik pembelajaran. Pratama (2024) menegaskan bahwa forum MGMP memiliki peran strategis sebagai wahana refleksi bersama dan berbagi praktik baik dalam penyusunan perangkat pembelajaran [2].

Ketika kolaborasi guru difungsikan secara berkelanjutan, beban administratif individual dapat ditekan dan kualitas perencanaan pembelajaran dapat ditingkatkan secara simultan. Guru tidak hanya saling berbagi format administrasi, tetapi juga mendiskusikan substansi pedagogik yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, MGMP internal madrasah dapat berperan sebagai komunitas belajar profesional yang mendukung penguatan kinerja pedagogik guru.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa optimalisasi administrasi kurikulum harus diarahkan pada penguatan makna dan fungsi pedagogiknya. Administrasi kurikulum perlu diposisikan sebagai alat refleksi profesional yang membantu guru memahami peserta didik, merancang pembelajaran yang adaptif, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara akuntabel. Digitalisasi dokumen pembelajaran, integrasi asesmen dengan perencanaan, serta penguatan kolaborasi guru melalui MGMP merupakan strategi kunci dalam menjadikan administrasi kurikulum sebagai instrumen peningkatan kinerja pedagogik guru, bukan sekadar pemenuhan tuntutan birokrasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pedagogik guru di Madrasah Tsanawiyah. Administrasi kurikulum yang disusun secara sistematis, terpadu, dan kontekstual berfungsi sebagai kerangka pedagogik yang memandu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara lebih terarah dan reflektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan administrasi kurikulum bukan terletak pada banyaknya dokumen yang harus disusun, melainkan pada lemahnya pemakaian administrasi sebagai instrumen pedagogik. Ketidakterpaduan antara perencanaan tertulis dan praktik pembelajaran di kelas berdampak pada rendahnya pemanfaatan data asesmen, terbatasnya diferensiasi pembelajaran, serta kurang optimalnya refleksi pedagogik guru. Optimalisasi administrasi kurikulum melalui penataan sistem dokumen, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kolaborasi guru terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pedagogik. Guru yang memiliki administrasi kurikulum yang tertata dengan baik cenderung menunjukkan pengelolaan pembelajaran yang lebih sistematis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, administrasi kurikulum perlu diposisikan tidak hanya sebagai alat kontrol manajerial, tetapi sebagai fondasi profesionalisme pedagogik guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah.

Referensi

1. Mulyasa, E. (2021). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
2. Pratama, R. A. (2024). Optimalisasi peran MGMP dalam penyusunan perangkat pembelajaran adaptif bagi guru madrasah. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 12(3), 201–214. <https://doi.org/10.XXXX/jip.v12i3.XXXX>
3. Mustofa, A. (2021). Pengaruh administrasi kelas terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), 211–220. <https://doi.org/10.XXXX/jiwp.v7i4.XXXX>
4. Aisyah, S., & Fitri, H. (2022). Digitalisasi administrasi guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 145–158. <https://doi.org/10.XXXX/jmpi.v7i2.XXXX>
5. Rachmaningtyas, N. A., Firdaus, N., Afendi, A. R., Ramadhanti, D., Halim, A., Raprap, W. P., & Fitriana, T. R. (2025). *Menjadi guru profesional: Strategi pembelajaran dan teknik evaluasi yang efektif*. Star Digital Publishing.
6. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
7. Widiansyah, S., Hidayat, S. P., Kamil, S. I., Purba, I. D. L. B., Rahmawati, U., & Khairo, F. M. A. (2025). Kesiapan guru dalam menghadapi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka (studi kasus di sekolah menengah atas). *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 344–362.
8. Faizah, I., Nurdiniyya, Y. Q. A., & Ningsih, I. M. (2025). Transformasi sistem informasi manajemen dalam pengelolaan kinerja guru sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 221–236.
9. Rohmaniah, D. S., Mudrikah, K. A., Ardani, M. H., Maulana, M. I., Hoiriyah, Y. N. M., & Mu'alimin, M. A. (2025). Strategi penciptaan iklim kelas kondusif melalui pengelolaan kelas dan penguatan etos kerja guru dalam meningkatkan kinerja pembelajaran. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(3), 120–136.
10. Thoharudin, M., Achmadi, A., Astuti, D. P., & Farizi, A. (2025). Peran MGMP sebagai komunitas belajar profesional dalam pengembangan kapasitas guru ekonomi di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 10(3), 965–981.
11. Rusdiana, A., Imaduddin, A., Chairunnisaq, S., Darojah, Z., & Mardiyah, M. (2026). Integrasi perencanaan supervisi dan rubrik penilaian instrumen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Al-Irsyad: Journal of Education Science*, 5(1), 190–214.
12. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
13. Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
14. Hidayat, T. (2023). Analisis kompetensi pedagogik guru Madrasah Tsanawiyah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Islam Terpadu*, 5(1), 33–45. <https://doi.org/10.XXXX/jpit.v5i1.XXXX>
15. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.